



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7767-7776

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Bumdesa: Horison Harapan Kemandirian Ekonomi Desa

Ainur Rofiq^{1✉}

Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi,

Jawa Timur, Indonesia

Email: rofiq6262@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi cara meningkatkan keterlibatan penduduk dalam upaya pembangunan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Beberapa literature telah menyoroti bahwa dalam konteks otonomi desa, peran masyarakat menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan lokal. Fokus penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana keterlibatan penduduk memberikan kontribusi terhadap kemajuan desa. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan BUMDesa memiliki peran yang beragam, tetapi ada motif serupa yang mendorong partisipasi dalam upaya pembangunan desa. Ini termasuk peningkatan pendapatan, pembentukan lembaga masyarakat untuk mengawasi manajemen BUMDesa dan desa, adopsi sistem kesaksian, serta pembentukan jaringan yang lebih luas. Masyarakat juga merasa terlibat aktif dalam berbagai pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah desa maupun BUMDesa. The results of the study confirmed that the form of community participation in village development through BUMDesa is strongly influenced by regional characteristics, which ultimately affects the economic patterns and livelihoods of the community.

Keywords: *BUMDesa, Economic Independence, Village Development, Community Role*

Abstract

This study aims to explore how to increase population involvement in village development efforts through Village-Owned Enterprises (BUMDesa). Some literature has highlighted that in the context of village autonomy, the role of the community is key in determining the success of local development. The focus of this research is to examine how community involvement contributes to village progress. The findings of this study show that community participation in the development of SOEs has diverse roles, but there are similar motives that encourage participation in village development efforts. These include increased revenue, the establishment of community institutions to oversee the management of SOEs and villages, the adoption of a testimony system, as well as the establishment of a wider network. The community also feels actively involved in various trainings organized by both the village government and BUMDesa. The results of the study confirmed that the form of community participation in village development through BUMDesa is strongly influenced by regional characteristics, which ultimately affects the economic patterns and livelihoods of the community.

Keywords: *BUMDesa, Economic Independence, Village Development, Community Role*

PENDAHULUAN

Pembangunan inklusif, yang selalu disebut-sebut sebagai prioritas pembangunan, untuk saat ini bukanlah sebuah utopia belaka. Pemerintah telah berusaha mewujudkan pembangunan inklusif ini sejak tahun 1999. Inklusif ini sejak tahun 1999, salah satunya melalui UU No. 22 Tahun 1999 tentang desentralisasi (Fatkhuri 2019). Undang-undang ini telah diubah beberapa kali, pertama kali pada tahun 2004 hingga akhirnya diamandemen lagi pada tahun 2014 melalui UU No. 23 Tahun 2014. Dengan UU No. 23 Tahun 2014, daerah diberikan kewenangan penuh untuk mengelola pemerintahannya. Hal ini tidak lain karena pemerintah daerah yang paling memahami perkembangan dan pertumbuhan potensi-potensi yang ada di daerahnya (Setyowati 2019; Suharyono 2020; Yendrizal and Rusdinal 2021).

Selain melalui UU No. 23 Tahun 2014, pembangunan inklusif berusaha diwujudkan dengan disahkannya UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan Undang-Undang Desa memberikan peluang bagi pembangunan berskala desa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat sehingga hasil pembangunan dirasakan secara lebih luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Sejak tahun 2015 hingga 2022, total Dana Desa yang telah disalurkan mencapai 400,1 triliun rupiah, dimana pada tahun 2022 Dana Desa yang disalurkan sebesar 68 triliun dengan jumlah desa yang dicakup mencapai 74.961 desa (Kementerian Keuangan, 2022).

Dana Desa telah disalurkan ke 74.961 desa sejak tahun 2015 hingga saat ini oleh masing-masing desa dalam bentuk mendukung pembangunan berbagai infrastruktur

antara lain jalan desa, embung, irigasi, jembatan, pasar desa, sarana air bersih, drainase drainase, sumur bor, dan sejumlah infrastruktur lainnya. Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, (Mattoasi et al. 2021; Steffy Adelia Tindi 2015) memberikan bahwa saat ini penyaluran Dana Desa juga diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan sektor prioritas dalam rangka mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu pilar pemerintah dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa adalah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Keputusan pemerintah untuk memprioritaskan BUMDesa sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pertumbuhan ekonomi di perdesaan cukup beralasan, dan hal ini terlihat jelas dalam PP No. 11 Tahun 2021. Dalam dokumen ini, BUMDesa ditugaskan untuk Dalam dokumen ini, BUMDesa ditugaskan dengan tanggung jawab untuk tidak hanya mengelola kegiatan ekonomi ekonomi dan memaksimalkan potensi desa, tetapi juga memberikan pelayanan publik, memastikan ketahanan pangan, menghasilkan keuntungan, dan menambah nilai aset desa. Namun demikian, tugas BUMDesa tidak terbatas pada pengembangan usaha berdasarkan potensi yang ada di desa saja. potensi yang ada di desa saja. Namun, tujuan utamanya adalah menciptakan kondisi ekonomi yang kondisi ekonomi yang menguntungkan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa (Setyobakti 2018).

Hal ini mencakup penyediaan layanan, pemberdayaan masyarakat dengan mendorong kolaborasi, dan menggunakan ekosistem digital untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang perkembangan ekonomi terkini. Para peneliti menyadari kompleksitas pengelolaan BUMDesa untuk mendukung ekonomi desa, dan oleh karena itu mereka secara khusus menyelidiki bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dimulai dari BUMDesa. Hal ini penting karena peran BUMDesa dalam dalam mempromosikan ekonomi inklusif tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. masyarakat yang aktif. Oleh karena itu, jika keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan BUMDesa meningkat, diharapkan diharapkan kesejahteraan masyarakat desa akan meningkat dalam jangka panjang. Sangat penting untuk melibatkan masyarakat masyarakat dalam semua tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan karena merekalah yang dapat mengidentifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat. masyarakat. Selain itu, masyarakat pada akhirnya akan mendapatkan manfaat dari dan menilai keberhasilan atau kegagalan pembangunan di wilayah mereka, termasuk di tingkat desa. Pemerintah daerah Pemerintah daerah, yang bertanggung jawab untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan, harus memastikan alokasi sumber daya yang efisien

dan efektif, serta meningkatkan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan (Setyobakti 2018).

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan hal tersebut mengacu pada keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam suatu kelompok situasi yang memotivasi mereka untuk mendukung tujuan kelompok dan memikul tanggung jawab untuk kelompok tersebut. Pencapaian dan keberlanjutan program pembangunan sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang atau kelompok secara sadar seseorang atau kelompok secara sadar untuk terlibat dalam suatu kegiatan (Zulkhizah, Fitriyani, and Wihardi 2018) .

Masyarakat Masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai cara selama tahap pembangunan: 1) Pada tahap perencanaan (fase perencanaan ide), individu terlibat dalam menyiapkan rencana dan strategi, membentuk kepanitiaan dan anggaran untuk suatu kegiatan/proyek. Masyarakat Partisipasi masyarakat dalam fase ini meliputi pemberian saran, rekomendasi, dan umpan balik melalui pertemuan-pertemuan; 2) Pada fase pelaksanaan, masyarakat berpartisipasi dalam melaksanakan suatu kegiatan/proyek. Masyarakat dapat menyumbangkan tenaga kerja, keuangan, material/barang, dan ide untuk berpartisipasi dalam pekerjaan; 3) Pada tahap pemanfaatan, masyarakat berpartisipasi berpartisipasi dalam memanfaatkan pekerjaan/proyek yang telah selesai. Pada tahap ini, partisipasi masyarakat berupa tenaga kerja dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun (Ardianti 2020).

Teori partisipasi Verba dan Nie (1987) menekankan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sumber daya, motivasi, dan kesempatan. Sumber daya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan status sosial ekonomi. Motivasi mencakup kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat terkait partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. dalam proses pengambilan keputusan. Peluang meliputi akses terhadap informasi, forum, dan proses pengambilan keputusan. pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam teori partisipasi Tangga Partisipasi Warga dari Arnstein (1969), terdiri dari delapan tingkatan partisipasi, mulai dari partisipasi manipulatif hingga partisipasi penuh masyarakat. Partisipasi manipulatif adalah ketika masyarakat hanyadiundang untuk memberikan dukungan atau persetujuan atas keputusan yang telah diambil oleh pemerintah atau lembaga pengambil keputusan. Sementara itu, partisipasi penuh masyarakat adalah adalah ketika masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari merumuskan gagasan hingga mengimplementasikannya bersama pemerintah atau lembaga pengambil keputusan. Model ini mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus terjadi pada

tingkat partisipasi yang lebih tinggi, di mana masyarakat memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan yang lebih tinggi, di mana masyarakat memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa. Pentingnya Pembangunan Desa bagi Perekonomian Kemajuan suatu negara tergantung pada desa, karena tidak mungkin suatu negara maju jika provinsinya tidak maju, demikian juga tidak ada provinsi yang maju tanpa tanpa kabupaten/kota yang maju, juga tidak mungkin ada kabupaten/kota yang maju tanpa adanya desa/kelurahan yang maju. Ini berarti bahwa dasar dari kemajuan suatu negara kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan desa. Kemajuan sebuah desa sangat ditentukan oleh pelaksanaan pembangunan. Dimana pembangunan desa memiliki tujuan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Larasati & Adhitama, 2018). Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan menumbuhkan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat, dengan penduduk pedesaan sebagai objek dan subjek pembangunan. Sementara beberapa segmen penduduk pedesaan membutuhkan dukungan untuk pemberdayaan, penduduk pedesaan juga memainkan peran penting sebagai kekuatan pendorong dalam proses pembangunan pedesaan dan nasional. pembangunan pedesaan dan nasional. Melalui mobilisasi sumber daya masyarakat dan pemerintah, pembangunan pedesaan pembangunan pedesaan menjadi pendekatan yang terprogram terhadap pembangunan wilayah pedesaan, dengan pembangunan desa menjadi kewajiban politik negara untuk mengatasi tantangan sosial ekonomi (Ariadi, 2019; Nain, 2019). BUMDesa sebagai Instrumen Pembangunan Desa BUMDesa dapat dijelaskan sebagai lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kohesi sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani, 2008). desa (Maryunani, 2008). Jadi BUMDesa merupakan lembaga bisnis yang berarti memiliki berfungsi untuk melakukan usaha guna mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba. Dalam prasyarat pelaksanaan BUMDesa, peran bisnis sebagai usaha bisnis ekonomi dan sosial telah dinyatakan secara eksplisit (Suleman et al., 2020). Peran ekonomi Peran ekonomi tentu saja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui melalui usaha-usaha yang dikelola BUMDesa dan kontribusinya terhadap kas desa atau PADesa. PADesa. Sedangkan peran secara sosial dapat dilihat dari

bagaimana nantinya keberadaan BUMDesa mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang selama ini terbina selama ini melalui kegiatan-kegiatan BUMDesa yang dikelola secara kolektif. Menurut Menurut Fitriyani, Nurmalina, Pebriana, & Suarsi, (2018), tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) antara lain untuk meningkatkan peran masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan asli desa yang sah, mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat desa, dalam unit-unit usaha desa, mengembangkan usaha sektor informal agar dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa, dan meningkatkan kreativitas pengusaha desa yang desa yang berpenghasilan rendah.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan suatu penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif dengan tujuan untuk menyelidiki secara mendalam mengenai strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Menurut Sigiyono (2013:241), triangulasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang tersedia. Untuk memastikan keabsahan data, dilakukan uji triangulasi sumber data. Sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa desa memiliki karakteristik yang berbeda, terutama dalam pengelolaan BUMDesa. Pengelolaan BUMDesa Pengelolaan BUMDesa merupakan salah satu kegiatan penting di desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi desa. Namun, Pengelolaan BUMDesa harus dilakukan dengan memperhatikan karakteristik desa agar dapat berjalan secara optimal. Pertama-tama, desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda tergantung pada kondisi geografis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan BUMDesa pengelolaan BUMDesa harus disesuaikan dengan karakteristik tersebut. Sebagai contoh, jika desa tersebut berada di wilayah yang sulit dijangkau, maka pengelolaan BUMDesa harus dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat tetap terhubung dengan masyarakat. Kedua, pengelolaan BUMDesa juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Desa memiliki keunikan dalam hal kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. masyarakatnya karena

masyarakat desa memiliki gaya hidup dan kebiasaan yang berbeda dengan masyarakat kota. masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, pengelolaan Bumdesa harus mengacu pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa. Sebagai contoh, jika masyarakat desa memiliki minat dan potensi di bidang pertanian, maka pengelolaan Bumdesa harus fokus pada pengembangan potensi pertanian di desa tersebut. Terakhir, pengelolaan BUMDesa harus melibatkan masyarakat desa secara aktif. Masyarakat desa adalah penggerak utama BUMDesa. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pengelolaan BUMDesa dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Misalnya, melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat diajarkan tentang berbagai topik yang berkaitan dengan partisipasi, termasuk (1) perencanaan yang melibatkan partisipasi aktif, (2) membentuk kelompok yang mendorong partisipasi, (3) membuat proposal kegiatan, (4) memantau dan mengevaluasi partisipasi, dan (5) membuat laporan yang meminta pertanggungjawaban individu atas partisipasi mereka. Pendidikan tinggi perguruan tinggi dapat berpartisipasi dalam program-program ini dengan terlibat dalam upaya penjangkauan masyarakat seperti program mandiri yang dipimpin oleh dosen atau inisiatif pengabdian masyarakat yang dibentuk oleh institusi (Hambali & Niode, 2019). Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dan memperkuat pengelolaan BUMDesa secara keseluruhan. Selain menekankan karakteristik desa pada pengelolaan BUMDesa, langkah-langkah pengelolaan BUMDesa tidak akan berhasil tanpa adanya partisipasi aktif dan berarti dari masyarakat desa itu sendiri, mengingat masyarakat desa adalah subjek pembangunan sekaligus sebagai salah satu modal pembangunan desa (human capital)(Hafan and Panggiarti 2020; Haryani and Asrida 2021; Putri 2019).

Dalam teori partisipasi Verba dan Nie (1987), disebutkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor utama: sumber daya, motivasi, dan kesempatan. Sumber daya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan status sosial ekonomi. Motivasi meliputi kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang berkaitan dengan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Peluang mencakup akses terhadap informasi, forum, dan proses pengambilan keputusan.

Teori Tangga Partisipasi Warga dari Arnstein (1969) merupakan model yang menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan(el-aal 2019).

Model ini terdiri dari delapan tingkat partisipasi, mulai dari partisipasi manipulatif

hingga partisipasi penuh partisipasi penuh masyarakat. Partisipasi manipulatif adalah ketika masyarakat hanya diajak untuk memberikan dukungan atau persetujuan terhadap keputusan yang telah diambil oleh pemerintah atau lembaga pengambil keputusan. Sedangkan partisipasi masyarakat penuh adalah ketika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. masyarakat terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari merumuskan gagasan hingga bersama-sama dengan pemerintah atau lembaga pengambil keputusan (Moon and Lee 2020; Syafar and Ulumi 2021).

Model ini mengajarkan bahwa partisipasi masyarakat yang efektif harus terjadi pada tingkat partisipasi yang lebih tinggi, dimana dimana masyarakat memiliki kekuatan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Salah satu strategi yang digunakan dalam teori peningkatan partisipasi masyarakat desa adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi dan mengambil keputusan terkait pembangunan desa. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan akses terhadap sumber daya dan informasi, serta meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada di desa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih aktif aktif dan terlibat dalam proses pembangunan desa serta dapat memperkuat posisi mereka dalam dalam pengambilan keputusan.

Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, keuangan, manusia, fisik, dan sosial penting bagi desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sembiring and Subekti 2021).

SIMPULAN

Desa harus harus menekankan karakteristik wilayahnya agar dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mengoptimalkan pengelolaan sumber daya tersebut secara efektif. Pertama-tama, desa harus mengelola sumber daya alam dengan memperhatikan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sebagai contoh pengembangan usaha pertanian dan perikanan dapat dilakukan jika desa memiliki potensi sumber daya alam yang memadai dan masyarakatnya memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. masyarakat memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. Kedua, desa juga harus mengoptimalkan pengelolaan keuangan dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan potensi sumber daya keuangan yang tersedia. Tingginya partisipasi masyarakat juga akan meningkatkan perolehan informasi sehingga mencegah

terjadinya asimetri informasi dalam pembangunan desa. Salah satu akibat dari asimetri informasi asimetri informasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kecurangan dalam pengelolaan BUMDesa dan pengelolaan keuangan desa (Putra, Saiti, dan keuangan desa. Desa dapat mengembangkan program pelatihan dan pengembangan usaha kecil dan menengah sehingga masyarakat dapat memiliki sumber sumber pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan fisik di desa juga harus dilakukan dengan dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur yang ada di desa, seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses sumber daya yang ada dan meningkatkan meningkatkan kesejahteraan mereka. Terakhir, pengelolaan sumber daya manusia dan sosial di desa juga harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Desa dapat mengembangkan program pelatihan dan pendidikan agar masyarakat dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada di desa. Selain itu, Desa juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dengan mengembangkan dialog dan forum-forum musyawarah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, keuangan, manusia, fisik, dan sosial berdasarkan karakteristik wilayah di desa, maka partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti, Fitri. 2020. "EFEKTIVITAS INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PROMOSI DESA WISATA MALASARI, KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR The Effectiveness of Instagram as a Promotion Media of Malasari Tourism Village, Nanggung, Bogor District." *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]* 4(6):796–809.
- el-aal, H. Abd. 2019. "A Future Vision to Activate the Role of Agricultural Cooperatives in Rural Development (An Evaluative Study of Agricultural Cooperatives in Damietta Governorate)." *Al-Azhar Journal of Agricultural Research* 44(1):168–87.
- Fatkhuri, Fatkhuri. 2019. "Desentralisasi Pendidikan Di Indonesia : Korupsi Dan Problem Politik Kekuasaan." *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3(2):278–97.
- Hafan, Fauziah aulia, and Endang Kartini Panggiarti. 2020. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PENGELOLAAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGELANG." *Jemasi: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi* 16(2):61–76.
- Haryani, Haryani, and Asrida Asrida. 2021. "Pengaruh Output Pertanian Dan Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Jurnal Ekonomika* 15(1).
- Mattoasi, M., Candra Cuga, Muhammad Sarlin, and S. Sudirman. 2021. "Keseimbangan Model

- Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Bonebolango." *Ecoplan* 4(1):21–31. doi: 10.20527/ecoplan.v4i1.227.
- Moon, Sunghye, and Sang-ho Lee. 2020. "A Strategy for Sustainable Development of Cooperatives in Developing Countries: The Success and Failure Case of Agricultural Cooperatives in Musambira Sector, Rwanda." *Sustainability* 12(20):8632.
- Putri, Husriatun. 2019. "Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Sektor Infrastruktur, Sektor Pertanian, Sektor Pariwisata Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2011-2015." *JURNAL SOSIAL EKONOMI DAN HUMANIORA* 5(2):237–51.
- Sembiring, Ruth Agnesia, and Tia Subekti. 2021. "Analisis Aktor Dalam Tata Kelola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Batu Untuk Kualitas Internasional." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7(1):31.
- Setyobakti, Hudi Moh. 2018. "Identification of Village Problems and Potentials Based on Village Development Index (IDM) in Gondowangi Village, Wagir District, Malang Regency." *Wiga: Journal of Economic Research* 7(1):1–14.
- Setyowati, Eka. 2019. "Tata Kelola Pemerintahan Desa Pada Perbedaan Indeks Desa Membangun (IDM): Studi Tiga Desa Di Kabupaten Malang." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53(9):1689–99.
- Steffy Adelia Tindi. 2015. "Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Studi Di Desa Pineleng Dua Kecamatan Pineleng." *Jurnal Politico* 4(2).
- Suharyono, Suharyono. 2020. "ANALISIS KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DI INDONESIA." *Jurnal Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi* 4(1):11.
- Syafar, Muhammad, and Helmy Faizi Bahrul Ulumi. 2021. "From Community Capital to Sustainable Rural Livelihood: Exploring Green Development Program in Masoso, Indonesia." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 5(1):77–104. doi: 10.14421/jpm.2021.051-04.
- Yendrizal, Yendrizal, and Rusdinal Rusdinal. 2021. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Pembelajaran Sekolah Dasar Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Tahun Ajaran 2020/2021." *Jurnal Bahana Manajemen Pendidikan* 10(1):35.
- Zulkhizah, Sita Kartina, Novi Sofia Fitriyani, and Yaya Wihardi. 2018. "Pengembangan Aplikasi Indeks Pembangunan Desa Berbasis WebGIS Dan Evaluasi Penerapan Menggunakan Metode PIECES." *JATIKOM: Jurnal Teori Dan Aplikasi Ilmu Komputer* 1(2):77–84.